

Integrasi Aqidah dengan Filsafat Politik Islam: dalam Ekonomi dan Bisnis

Wahyu Wiji Utomo¹

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; wahyuwijiutomo@uinsu.ac.id

Received: 15/11/2024

Revised: 30/11/2024

Accepted: 20/12/2024

Abstract

This study explores the integration of aqidah with Islamic political philosophy in the fields of economics and business as a holistic approach to achieve both material and spiritual well-being. In the context of a global economy often focused solely on material gains, this integration offers an ethical framework emphasizing justice, welfare, and social responsibility. This research employs a descriptive qualitative approach to examine Islamic principles from primary sources, such as the Qur'an and Hadith, as well as related literature. The findings indicate that aqidah integrated into Islamic political and economic philosophy can guide economic actors to conduct business activities that are not only financially profitable but also bring blessings and sustainability. Thus, this concept is expected to shape a more balanced and sustainable economic order.

Keywords

Aqidah integration; Islamic political philosophy; Islamic economics; social justice; responsibility

Corresponding Author

Wahyu Wiji Utomo

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; wahyuwijiutomo@uinsu.ac.id

1. PENDAHULUAN

Integrasi antara aqidah dan filsafat politik Islam dalam ekonomi dan bisnis merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara kesejahteraan material dan kebahagiaan spiritual. Dalam konteks global, ekonomi cenderung didominasi oleh pendekatan materialistis yang mengutamakan keuntungan finansial semata. Hal ini sering kali mengabaikan nilai-nilai spiritual dan moralitas, yang pada akhirnya menciptakan ketimpangan sosial, ketidakadilan, dan berbagai praktik ekonomi yang merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek finansial tetapi juga mengintegrasikan aqidah untuk memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi membawa berkah serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam konteks sekarang, dunia menyaksikan fenomena umat Islam yang ingin mendasarkan seluruh kerangka kehidupan politik, sosial, dan ekonomi pada ajaran Islam secara komprehensif (Masyhuri, 2022).

Dalam Islam, konsep *falah* atau kebahagiaan yang mencakup aspek duniawi dan ukhrawi menjadi landasan utama bagi ekonomi Islam. Filosofi ini mengarahkan umat Muslim untuk menjadikan ekonomi sebagai sarana mencapai kebaikan bersama, bukan sekadar memperoleh kekayaan. Aqidah yang kuat dapat membimbing setiap individu untuk bertindak adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam segala aspek bisnis dan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, banyak umat Islam yang masih



terbawa arus konsumerisme yang bertentangan dengan prinsip Islam. Gaya hidup konsumtif ini tidak hanya mengganggu keseimbangan finansial pribadi tetapi juga menimbulkan ketergantungan ekonomi yang merugikan. Dengan demikian, integrasi aqidah dalam ekonomi dan bisnis Islam bertujuan untuk mengubah pola pikir umat agar lebih produktif, mandiri, dan etis dalam aktivitas ekonominya.

Selain itu, perkembangan teknologi dan perubahan sosial di era globalisasi memberikan tantangan baru bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Teknologi memungkinkan akses yang lebih luas dan cepat terhadap berbagai produk dan layanan keuangan. Namun, tanpa pemahaman yang baik mengenai prinsip syariah, umat Islam berisiko tergelincir dalam praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan dan pelatihan dalam ekonomi Islam menjadi semakin penting agar umat mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan tetap berpegang pada aqidah. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa perkembangan zaman tidak mengorbankan nilai-nilai spiritual dan moralitas yang diajarkan dalam Islam. Moralitas adalah teknik yang membahas esensi kebajikan kemanusiaan dan membedakannya dengan sisi iblis manusia (Shamsaei & Mahmoudi, 2017).

Lembaga-lembaga ekonomi Islam seperti bank syariah, koperasi syariah, dan lembaga zakat memiliki peran strategis dalam mendorong integrasi aqidah dengan ekonomi dan bisnis Islam. Lembaga-lembaga ini menyediakan produk dan layanan berbasis syariah yang dapat membantu umat menjalankan transaksi yang sesuai dengan ajaran Islam. Meski begitu, agar efektivitas lembaga-lembaga ini optimal, perlu ada peningkatan dalam inovasi produk, pemanfaatan teknologi, serta edukasi kepada masyarakat. Dengan integrasi aqidah yang menyeluruh dalam aspek politik, ekonomi, dan bisnis, diharapkan masyarakat Muslim dapat mencapai kesejahteraan secara menyeluruh, menjaga keadilan sosial, serta menghindari praktik-praktik ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang berfokus pada analisis konsep integrasi aqidah dengan filsafat politik Islam dalam konteks ekonomi dan bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara keyakinan (aqidah) dan penerapannya dalam prinsip-prinsip politik Islam yang mendasari aktivitas ekonomi umat Muslim, khususnya di Indonesia. Unit analisis penelitian ini adalah berbagai konsep dan nilai dalam aqidah Islam yang relevan dengan filsafat politik dan diterapkan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Objek penelitian meliputi ajaran-ajaran dalam Alquran, Hadis, serta literatur-literatur keilmuan yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan filsafat politik.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari teks-teks keagamaan, yaitu Alquran dan Hadis, yang memberikan landasan dasar tentang nilai-nilai aqidah dan etika dalam berpolitik dan berbisnis. Sumber data sekunder mencakup literatur ilmiah, seperti buku, jurnal, serta artikel yang membahas ekonomi Islam, filsafat politik Islam, dan prinsip-prinsip aqidah yang diterapkan dalam praktik ekonomi dan bisnis.

Data dikumpulkan melalui studi literatur dan telaah dokumen, yang mencakup penelaahan terhadap sumber-sumber yang relevan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang bagaimana aqidah dan filsafat politik Islam mempengaruhi tata kelola ekonomi dan bisnis. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menganalisis secara menyeluruh nilai-nilai dalam teks-teks keagamaan dan penerapannya dalam ekonomi Islam.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis konten dan tematik, di mana data dikategorikan berdasarkan tema-tema utama seperti nilai keadilan, kesejahteraan, tanggung jawab sosial, dan etika dalam bisnis Islam. Hasil analisis ini diinterpretasikan untuk memahami peran aqidah sebagai fondasi etis dalam membangun sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga kesejahteraan spiritual. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan interpretasi mendalam yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan filsafat politik Islam, yang dapat digunakan sebagai panduan dalam pengembangan ekonomi yang berbasis nilai-nilai Islam. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat menjawab pertanyaan tentang relevansi aqidah dalam membentuk sistem ekonomi dan politik yang beretika serta berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Memahami Landasan Aqidah dan Filsafat Politik Islam

Aqidah dalam Islam adalah fondasi keyakinan yang menuntun perilaku dan pandangan hidup seorang Muslim, termasuk dalam aspek politik. Aqidah tidak hanya terbatas pada ritual ibadah, tetapi juga memberikan panduan etis dalam berpolitik. Dalam konteks filsafat politik Islam, aqidah menjadi landasan moral dan etika yang mempengaruhi cara seorang pemimpin menjalankan kekuasaannya serta bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Integrasi aqidah ke dalam filsafat politik Islam berperan sebagai pendorong agar nilai-nilai spiritual dan etika selalu hadir dalam setiap pengambilan keputusan politik. pengembangan potensi manusia dapat diperoleh dengan penerapan prinsip-prinsip Islam, yang pertama-tama mengacu pada perkembangan spiritual dan moral (Ariton-Gelan, 2015).

Filsafat politik Islam berfokus pada konsep keadilan, kesejahteraan bersama, dan tanggung jawab sosial, di mana tujuan politik bukanlah semata-mata kekuasaan tetapi juga amanah untuk menyejahterakan umat. Ketika aqidah menjadi dasar filsafat politik Islam, kebijakan dan keputusan politik tidak hanya ditujukan untuk kemaslahatan duniawi tetapi juga untuk mencapai ridha Allah. Dengan demikian, pemimpin yang berpegang teguh pada aqidah diharapkan mampu menjalankan amanah politik secara adil dan bertanggung jawab serta menjadikan nilai-nilai spiritual sebagai pedoman utama.

Dalam filsafat politik Islam, keadilan adalah salah satu prinsip utama yang harus ditegakkan oleh setiap pemimpin. Keadilan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan hukum dan keadilan sosial, tetapi juga dengan pemenuhan hak-hak dasar manusia. Dengan aqidah sebagai panduan, filsafat politik Islam menuntut agar pemimpin berbuat adil terhadap rakyatnya, tanpa memandang latar belakang atau golongan. Pemimpin diharapkan bertindak sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan persamaan hak dan kewajiban. Integrasi aqidah ini mendorong terciptanya sistem politik yang memperjuangkan keadilan untuk seluruh masyarakat.

Selain itu, konsep musyawarah (*syura*) merupakan elemen penting dalam filsafat politik Islam yang selaras dengan nilai aqidah. Musyawarah mengajarkan pentingnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Dengan landasan aqidah, musyawarah tidak hanya menjadi prosedur politik, tetapi juga wujud tanggung jawab seorang pemimpin untuk mendengar aspirasi rakyatnya. Proses musyawarah yang berlandaskan aqidah mendorong pemimpin untuk

bersikap transparan dan menerima masukan dari masyarakat, sehingga keputusan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan umat.

Aqidah juga menjadi faktor yang mengedepankan etika dalam kehidupan politik. Filsafat politik Islam menekankan pentingnya nilai-nilai kejujuran, integritas, dan akuntabilitas dalam menjalankan kekuasaan. Pemimpin yang berlandaskan aqidah akan menjauhi tindakan korupsi dan ketidakadilan, karena dalam Islam setiap tindakan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dengan integrasi aqidah, filsafat politik Islam menciptakan landasan etika yang kuat dalam dunia politik, di mana pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan yang Maha Esa. Etika yang ditawarkan dengan demikian tidak terbatas pada tingkah laku individu. Ini memberikan panduan dan pedoman untuk perilaku sosial, ekonomi, politik, budaya, dan hukum manusia (Mehmoona & Sultana, 2020).

Prinsip lain dalam filsafat politik Islam yang sejalan dengan aqidah adalah rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial. Islam mengajarkan bahwa pemimpin memiliki kewajiban untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Aqidah mendorong pemimpin untuk menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama dalam kebijakan politik mereka. Dengan demikian, filsafat politik Islam yang berpadu dengan aqidah memungkinkan terbentuknya sistem yang berfokus pada kesejahteraan kolektif, bukan hanya untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu.

Lebih dari itu, aqidah dan filsafat politik Islam juga mendorong terciptanya kesetaraan dan persaudaraan dalam masyarakat. Islam mengajarkan bahwa semua manusia adalah sama di hadapan Allah dan memiliki hak serta kewajiban yang setara. Integrasi aqidah ini menghindarkan terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan dalam kehidupan politik. Filsafat politik Islam yang berlandaskan aqidah membentuk masyarakat yang saling menghormati, memperlakukan satu sama lain dengan adil, dan memperjuangkan kepentingan bersama.

Secara keseluruhan, integrasi aqidah dengan filsafat politik Islam bertujuan untuk menciptakan sistem politik yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan duniawi, tetapi juga pada nilai-nilai spiritual dan moral. Dengan menjadikan aqidah sebagai landasan, filsafat politik Islam dapat diwujudkan secara holistik dalam tatanan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berakhlak. Sistem ini memungkinkan terciptanya kehidupan bernegara yang seimbang, di mana setiap keputusan politik selalu mempertimbangkan tanggung jawab terhadap Allah, masyarakat, dan lingkungan.

Hubungan antara aqidah dan filsafat politik Islam sangat terkait, karena Aqidah berfungsi sebagai sistem kepercayaan dasar yang memandu kerangka etika dan moral di mana filsafat politik Islam beroperasi. Aqidah mempengaruhi pengambilan keputusan politik dengan menanamkan nilai-nilai spiritual dan etika ke dalam proses pemerintahan, memastikan bahwa tindakan politik selaras dengan ajaran Islam. Integrasi ini menekankan keadilan, kesejahteraan sosial, dan partisipasi masyarakat, yang bertujuan untuk mencapai tidak hanya kesuksesan duniawi tetapi juga kesenangan Allah. Bagian berikut mengeksplorasi aspek-aspek kunci dari hubungan ini.

Keadilan dan Tanggung Jawab Sosial

Filsafat politik Islam, yang didasarkan pada aqidah, memprioritaskan keadilan sebagai prinsip inti. Ini mencakup keadilan hukum, sosial, dan hak asasi manusia, menuntut para pemimpin untuk bertindak adil dan adil (Masyhuri, 2022; Rani, 2022). Para pemimpin diharapkan untuk memastikan

pemenuhan hak asasi manusia dasar dan memerintah dengan integritas dan akuntabilitas, menghindari korupsi dan ketidakadilan (Jughaiman, 2019).

Musyawaharah dan Partisipasi Masyarakat

Konsep *syura* (musyawarah) merupakan bagian integral dari filsafat politik Islam, mempromosikan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Aqidah memperkuat hal ini dengan menjadikan musyawarah sebagai kewajiban moral, memastikan para pemimpin mempertimbangkan aspirasi rakyat mereka (Masyhuri, 2022; Rani, 2022). Proses ini mendorong transparansi dan daya tanggap, menyelaraskan keputusan politik dengan kebutuhan komunitas (Jughaiman, 2019).

Tata Kelola Etis

Aqidah menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan akuntabilitas pada para pemimpin politik, yang dipandang sebagai pelayan yang bertanggung jawab kepada masyarakat dan Tuhan (Masyhuri, 2022; Jughaiman, 2019). Filsafat politik Islam, oleh karena itu, menciptakan landasan etika yang kuat, mencegah praktik tidak etis seperti korupsi (Rani, 2022).

Kesejahteraan Sosial dan Kesetaraan

Aqidah menekankan tanggung jawab para pemimpin untuk memprioritaskan kesejahteraan masyarakat, memastikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan keamanan bagi semua (Masyhuri, 2022; Jughaiman, 2019). Integrasi Aqidah menumbuhkan sistem politik yang memperjuangkan kesetaraan dan persaudaraan, menghindari diskriminasi dan mempromosikan harmoni sosial (Alwajeeh, 2021). Sementara Aqidah memberikan landasan etika dan moral yang kuat untuk filsafat politik Islam, penting untuk mengenali keragaman dalam pemikiran Islam. Penafsiran dan aliran pemikiran yang berbeda, seperti Zayd bin 'Ali dan Yahyā bin al-Husayn, menyoroti berbagai pendekatan terhadap pemerintahan politik dan peran prinsip-prinsip agama dalam politik (Alwajeeh, 2021). Keragaman ini mencerminkan sifat dinamis filsafat politik Islam dan kemampuan beradaptasi dengan konteks kontemporer.

Integrasi Aqidah dan Filsafat Politik Islam dalam Ekonomi dan Bisnis

Dalam konsep Islam, aqidah dan filsafat politik tidak hanya terbatas pada pengaturan sosial atau hubungan antar individu, tetapi juga mencakup aspek ekonomi dan bisnis. Aqidah sebagai fondasi iman seseorang memberikan nilai-nilai spiritual yang membimbing perilaku umat Islam dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Filsafat politik Islam, di sisi lain, menawarkan panduan etis dan prinsip-prinsip keadilan yang sangat diperlukan dalam pengelolaan ekonomi. Integrasi aqidah dan filsafat politik ini bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem yang tidak hanya mengejar kesejahteraan material, tetapi juga kebahagiaan spiritual.

Dalam penerapannya di dunia bisnis, nilai-nilai aqidah Islam mendorong para pelaku usaha untuk mengutamakan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Nilai-nilai ini mendorong bisnis untuk tidak hanya mengejar keuntungan finansial semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan etis dari aktivitas bisnis yang dilakukan. Dengan demikian, bisnis yang berbasis pada aqidah Islam berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kesejahteraan material dan kebahagiaan spiritual, di mana kedua aspek ini dianggap saling melengkapi dan mendukung.

Filsafat politik Islam memberikan landasan yang lebih luas dalam pengaturan hubungan antara bisnis dan masyarakat. Salah satu konsep penting adalah "*maslahah*" atau kemaslahatan umum, yang menekankan bahwa semua tindakan dan keputusan dalam bisnis harus memperhatikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ini, bisnis tidak boleh menjadi alat eksploitasi atau perusak lingkungan, tetapi harus berkontribusi pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Prinsip keadilan distribusi juga sangat ditekankan dalam filsafat politik Islam, di mana kekayaan harus disebarakan secara adil dan tidak terpusat pada segelintir individu atau kelompok.

Salah satu cara menerapkan integrasi ini dalam praktik ekonomi adalah melalui sistem perbankan syariah dan keuangan Islam. Sistem ini menekankan prinsip-prinsip yang sesuai dengan aqidah dan filsafat politik Islam, seperti larangan riba (bunga), spekulasi yang berlebihan, serta mendorong transaksi yang berdasarkan pada kejujuran dan keadilan. Melalui instrumen-instrumen keuangan syariah, masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara material, tetapi juga mendukung tujuan spiritual, yaitu mendapatkan keridaan Allah SWT.

Selain sistem perbankan, integrasi aqidah dan filsafat politik Islam juga dapat diterapkan melalui praktik bisnis yang beretika, seperti zakat, infak, dan sedekah. Prinsip-prinsip ini mendorong redistribusi kekayaan untuk membantu mereka yang kurang beruntung, serta mencegah ketimpangan ekonomi yang ekstrem dalam masyarakat. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, tidak hanya membantu mengatasi kemiskinan tetapi juga menciptakan solidaritas sosial yang kuat. Praktik ini memperkuat prinsip keadilan distribusi dan memastikan bahwa bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata tetapi juga bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas.

Dalam dunia bisnis modern, konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat dilihat sebagai upaya untuk mencerminkan nilai-nilai Islam dalam dunia bisnis. CSR yang sesuai dengan ajaran Islam mencakup tanggung jawab sosial, lingkungan, dan ekonomi yang dilakukan perusahaan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Namun, CSR dalam perspektif Islam bukan sekadar strategi bisnis, tetapi merupakan bagian dari kewajiban moral yang berdasarkan aqidah. Dengan mengintegrasikan aqidah dan filsafat politik Islam dalam CSR, bisnis dapat memberikan kontribusi yang lebih holistik bagi kesejahteraan masyarakat.

Integrasi antara aqidah dan filsafat politik Islam dalam ekonomi dan bisnis memungkinkan tercapainya keseimbangan antara kesejahteraan material dan kebahagiaan spiritual. Dengan menjadikan aqidah sebagai dasar dan filsafat politik Islam sebagai pedoman, bisnis dapat dikelola dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Pendekatan ini bukan hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat harmoni sosial dan kebahagiaan spiritual yang merupakan tujuan akhir dalam Islam. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, pelaku bisnis dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan beretika.

Pendekatan Ekonomi Modern yang Mengabaikan Nilai Spiritual dan Moral

Dalam perkembangan ekonomi modern, pendekatan yang dominan sering kali berakar pada pemikiran sekuler yang fokus pada pertumbuhan material dan keuntungan maksimal. Ideologi kapitalisme yang mengutamakan keuntungan individu dan efisiensi material telah menciptakan struktur ekonomi yang berorientasi pada produktivitas tanpa memperhitungkan nilai-nilai spiritual dan moral. Fokus pada kapitalisme yang berlebihan ini menyebabkan pelaku ekonomi sering

mengesampingkan aspek etika dan spiritual, yang seharusnya bisa menjadi pengimbang dalam mengelola sistem ekonomi yang adil dan sejahtera. Akibatnya, nilai-nilai moral sering dianggap tidak relevan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Salah satu alasan mengapa pendekatan ekonomi yang dominan mengabaikan dimensi spiritual dan moral adalah karena pengaruh teori ekonomi klasik dan neoklasik yang menekankan rasionalitas dan objektivitas dalam analisis ekonomi. Dalam teori-teori ini, individu dipandang sebagai entitas yang selalu mengejar keuntungan pribadi atau "*homo economicus*" tanpa mempertimbangkan tanggung jawab moral terhadap sesama manusia atau lingkungan. Pandangan ini menciptakan jarak antara ilmu ekonomi dan nilai-nilai kemanusiaan, di mana aspek spiritual dianggap tidak sesuai dengan tujuan-tujuan ekonomi yang lebih bersifat materialistik dan terukur secara kuantitatif.

Akibat dari pendekatan ekonomi yang hanya berfokus pada aspek material adalah meningkatnya ketimpangan sosial dan ketidakadilan ekonomi. Sistem ekonomi yang terlalu menitikberatkan pada keuntungan pribadi cenderung memfasilitasi akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang, sementara sebagian besar masyarakat mengalami stagnasi atau bahkan kemerosotan ekonomi. Ketimpangan ini terjadi karena mekanisme pasar bebas yang didorong oleh kapitalisme sering kali hanya menguntungkan mereka yang memiliki akses lebih besar terhadap modal dan sumber daya. Hal ini mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang lebar, di mana kekayaan terkonsentrasi pada kelompok elit dan ketidakadilan sosial semakin terasa.

Ketika nilai-nilai moral dan spiritual diabaikan dalam ekonomi, etika bisnis pun menjadi lemah, menyebabkan berbagai bentuk eksploitasi terhadap tenaga kerja dan sumber daya alam. Bisnis dan korporasi besar sering kali hanya fokus pada efisiensi biaya untuk meningkatkan margin keuntungan, yang sering berakhir dengan praktik upah rendah, pengurangan hak-hak pekerja, serta pengabaian terhadap kelestarian lingkungan. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan tidak melihat tanggung jawab sosialnya sebagai bagian dari bisnis mereka, melainkan lebih sebagai beban atau penghambat keuntungan. Akibatnya, kondisi sosial masyarakat semakin memburuk, dan ketidakpuasan serta ketidakadilan semakin meningkat.

Dampak lain dari pendekatan ekonomi yang abai terhadap nilai spiritual adalah krisis identitas dan makna hidup di kalangan masyarakat modern. Ketika ekonomi hanya mengejar materialisme tanpa memperhatikan tujuan spiritual, banyak individu yang merasa kehilangan arah dan mengalami kekosongan makna. Kesejahteraan material tidak selalu berbanding lurus dengan kebahagiaan, dan ketika aspek spiritual diabaikan, individu cenderung terjebak dalam siklus konsumsi tanpa batas yang tidak memberikan kepuasan batin. Hal ini memperburuk masalah sosial seperti stres, depresi, dan meningkatnya masalah kesehatan mental di kalangan masyarakat.

Pendekatan ekonomi yang dominan juga tidak mendorong integrasi nilai spiritual dalam keputusan ekonomi, yang akhirnya memperkuat siklus ketidakadilan. Tanpa dasar etika yang kuat, kebijakan ekonomi yang dibuat sering kali hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan. Dalam kondisi ini, kebijakan yang seharusnya melindungi masyarakat rentan dan mempromosikan keadilan sosial justru sering terabaikan. Hal ini memperkuat ketimpangan yang ada, sehingga kelompok miskin tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan kelompok kaya semakin memperbesar kekayaannya.

Pengabaian nilai-nilai spiritual dan moral dalam pendekatan ekonomi modern memiliki dampak yang sangat serius terhadap ketimpangan sosial dan ketidakadilan ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, pendekatan yang lebih holistik dan berimbang sangat diperlukan, di mana ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan material tetapi juga mempertimbangkan aspek spiritual dan etika dalam pengambilan keputusan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral dan spiritual dalam ekonomi, diharapkan tercipta sebuah sistem yang lebih adil dan mampu mengurangi ketimpangan sosial yang semakin menganga.

Lembaga Ekonomi Islam dalam Integrasi Aqidah dan Prinsip Syariah dalam Ekonomi

Lembaga-lembaga ekonomi Islam seperti bank syariah, koperasi syariah, dan lembaga zakat memainkan peran penting dalam mendukung prinsip-prinsip Islam dalam ekonomi dan bisnis. Tentu saja ada perbedaan bahwa etika spiritual digunakan sebagai pedoman perilaku ekonomi dalam ekonomi Islam (Sayem et al., 2023). Melalui pendekatan yang mengintegrasikan aqidah, atau keyakinan dasar dalam Islam, dengan kegiatan ekonomi, lembaga-lembaga ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang tidak hanya produktif secara material tetapi juga sesuai dengan etika dan moral Islam. Aqidah menjadi landasan dalam setiap aktivitas ekonomi, di mana tujuan utamanya bukan sekadar keuntungan finansial, tetapi juga keberkahan dan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Bank syariah, sebagai salah satu lembaga ekonomi Islam yang paling dikenal, berfungsi sebagai alternatif bagi perbankan konvensional yang sering kali beroperasi dengan prinsip bunga (*riba*), yang dilarang dalam Islam. Bank syariah menerapkan konsep-konsep seperti *mudharabah* (kemitraan), *musyarakah* (kerja sama), dan *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan) yang memungkinkan keuntungan diperoleh tanpa adanya praktik *riba*. Dengan demikian, bank syariah mendukung kegiatan ekonomi yang selaras dengan aqidah Islam dan prinsip-prinsip syariah, sehingga umat Islam dapat berpartisipasi dalam sistem keuangan tanpa melanggar keyakinan agama mereka.

Selain bank syariah, koperasi syariah juga memegang peran penting dalam mendorong ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Berbeda dengan koperasi konvensional, koperasi syariah beroperasi berdasarkan prinsip musyawarah, keadilan, dan persaudaraan. Anggota koperasi syariah bersama-sama mengelola usaha dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk keuntungan pribadi. Dengan konsep ini, koperasi syariah dapat mengurangi ketimpangan ekonomi di antara anggotanya dan meningkatkan solidaritas sosial, sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mementingkan keadilan sosial dan pemerataan kekayaan.

Lembaga zakat adalah bagian penting dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Zakat, yang merupakan salah satu rukun Islam, diwajibkan bagi umat Muslim yang mampu untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dengan adanya lembaga zakat, dana yang terkumpul dari masyarakat mampu dapat disalurkan secara sistematis dan tepat sasaran, sehingga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang kurang mampu. Dalam konteks ekonomi, zakat dapat mendorong sirkulasi kekayaan yang lebih merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan prinsip keadilan distribusi dalam Islam.

Lembaga-lembaga ekonomi Islam juga berperan dalam mendorong akhlak dan etika bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Bank syariah, koperasi syariah, dan lembaga zakat menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi dalam setiap aktivitas ekonomi. Nilai-nilai ini berperan penting dalam membangun kepercayaan di antara pelaku ekonomi dan mencegah praktik-praktik yang

merugikan, seperti kecurangan atau eksploitasi. Dengan adanya integrasi aqidah dalam lembaga-lembaga ekonomi Islam, etika bisnis bukan lagi sekadar formalitas tetapi menjadi bagian mendasar dari operasional bisnis yang mendukung keberlanjutan jangka panjang.

Situasi politik dan sosial sangat dipengaruhi oleh situasi ekonomi masyarakat mana pun. Oleh karena itu, rezeki memiliki hubungan yang erat dengan politik dan masyarakat dalam Islam sebagai warga negara atau hak asasi manusia (Jughaiman, 2019). Lebih jauh, lembaga ekonomi Islam juga mendorong investasi sosial melalui program-program pemberdayaan yang berorientasi pada pembangunan masyarakat. Bank syariah dan koperasi syariah sering mengalokasikan dana untuk membiayai usaha kecil dan menengah, yang merupakan tulang punggung perekonomian di banyak negara Muslim. Dengan memberikan modal kepada para pengusaha kecil, lembaga ekonomi Islam tidak hanya meningkatkan perekonomian lokal tetapi juga mendukung penciptaan lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan, semua ini dilakukan sesuai dengan aqidah dan prinsip syariah yang mengutamakan manfaat bagi umat.

Selain pemberdayaan ekonomi, lembaga zakat juga berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, yang merupakan aspek penting dalam pembangunan ekonomi jangka panjang. Dengan alokasi zakat untuk beasiswa pendidikan dan program kesehatan bagi yang kurang mampu, lembaga zakat mendukung terciptanya masyarakat yang lebih berdaya dan produktif. Kontribusi ini mencerminkan komitmen Islam terhadap pembangunan manusia secara menyeluruh dan mengintegrasikan aspek spiritual dengan kesejahteraan material, sehingga tercapai keseimbangan antara dunia dan akhirat.

Lembaga ekonomi Islam seperti bank syariah, koperasi syariah, dan lembaga zakat berperan penting dalam mengintegrasikan aqidah dengan praktik ekonomi yang sesuai syariah. Dengan landasan aqidah, lembaga-lembaga ini memberikan alternatif yang adil dan beretika dalam dunia ekonomi yang sering kali hanya berorientasi pada keuntungan. Melalui pendekatan ini, lembaga ekonomi Islam tidak hanya membantu umat Muslim memenuhi kewajiban agama mereka, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi masyarakat secara luas. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat membangun sistem ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

Menjalankan bisnis dan terlibat dalam perdagangan membutuhkan dedikasi serta kerja keras yang konsisten. Dalam setiap langkah yang penuh usaha ini, ada kepuasan batin yang unik dan jarang ditemukan dalam profesi lain. Bidang bisnis menekankan pencapaian nyata sebagai landasan, yang secara bertahap akan membangun reputasi, bukan sebaliknya. Kesuksesan dalam bisnis harus berawal dari upaya yang sungguh-sungguh di berbagai aspek. Di dunia kewirausahaan, kerja keras bukan hanya sekadar prinsip, tetapi merupakan tindakan konkret yang menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan. Namun, jalan menuju sukses ini sering kali penuh dengan tantangan dan risiko yang perlu dihadapi.

Rasulullah saw., yang juga pernah menjadi wirausahawan, memberikan contoh inspiratif yang berharga bagi konsep kewirausahaan yang berlandaskan syariah. Nilai-nilai mendasar yang beliau ajarkan, seperti kejujuran (*shiddiq*), integritas (*amânah*), kecerdasan (*fathânah*), dan kemampuan komunikasi yang efektif (*tablîg*), adalah karakteristik utama yang harus dimiliki seorang wirausahawan Muslim. Sebagai pemimpin dan sekaligus pebisnis, Nabi Muhammad saw. terus mendorong umatnya untuk berusaha secara aktif dalam mencari rezeki yang halal dari Allah. Islam mengajarkan bahwa rezeki tidak seharusnya hanya ditunggu, tetapi dicari dengan usaha sungguh-sungguh.

Menurut ajaran Islam, Allah membagikan rezeki sesuai dengan kadar usaha dan ketekunan manusia, yang sejalan dengan prinsip universal dalam bisnis: menjaga amanah dan membangun kepercayaan. Selain itu, seorang wirausahawan juga perlu memiliki pengetahuan serta keterampilan bisnis yang tepat untuk menjalankan usaha dengan efektif. Oleh sebab itu, semakin besar dedikasi dan energi yang dicurahkan dalam berusaha, semakin besar pula berkah rezeki yang akan diberikan oleh Allah Swt.

Oleh karena itu, kalau memperhatikan dinamika kehidupan sekarang yang kian kompetitif, maka dituntut untuk cerdas dalam menciptakan ruang yang kondusif bagi tumbuhnya spirit entrepreneurship. Bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai empat hal utama: (1) target hasil: profit-materi dan benefit-non materi; (2) pertumbuhan; (3) keberlangsungan; (4) keberkahan.

Hasil yang diharapkan dari sebuah bisnis mencakup profit material dan manfaat non-material. Artinya, tujuan bisnis bukan hanya untuk meraih keuntungan finansial (*qimah madiyah* atau nilai materi) setinggi mungkin, tetapi juga untuk memberikan manfaat yang lebih luas, baik bagi organisasi internal maupun lingkungan eksternal. Manfaat ini termasuk terciptanya rasa persaudaraan, kepedulian sosial, dan kontribusi positif lainnya bagi masyarakat.

Dalam konteks Islam, manfaat yang dimaksudkan melampaui sekadar keuntungan material; ia juga mencakup nilai-nilai non materi. Islam menekankan bahwa setiap amal tidak hanya berfokus pada *qimah madiyah*, tetapi mencakup tiga orientasi nilai lainnya: *qimah insaniyah*, *qimah khuluqiyah*, dan *qimah ruhiyah*. *Qimah insaniyah* mengarah pada upaya untuk memberikan manfaat kemanusiaan, seperti membuka lapangan pekerjaan, memberikan bantuan sosial (seperti sedekah), dan kontribusi lainnya. Sementara itu, *qimah khuluqiyah* menekankan bahwa setiap aktivitas bisnis harus dilandasi oleh nilai-nilai akhlak yang luhur, sehingga menciptakan hubungan yang tidak hanya profesional tetapi juga Islami dan bersahabat. Sementara itu *qimah ruhiyah* berarti aktivitas dijadikan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Pertumbuhan, jika profit materi dan profit non materi telah diraih, perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan agar selalu meningkat. Upaya peningkatan ini juga harus selalu dalam koridor syariah, bukan menghalalkan segala cara. Keberlangsungan, target yang telah dicapai dengan pertumbuhan setiap tahunnya harus dijaga keberlangsungannya agar perusahaan dapat terkenal dalam kurun waktu yang lama. Keberkahan, semua tujuan yang telah tercapai tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka bisnis Islam menempatkan berkah sebagai tujuan inti, karena ia merupakan bentuk dari diterimanya segala aktivitas manusia. Keberkahan ini menjadi bukti bahwa bisnis yang dilakukan oleh pengusaha muslim telah mendapat ridha dari Allah Swt., dan bernilai ibadah.

KESIMPULAN

Integrasi aqidah dengan filsafat politik Islam dalam ekonomi dan bisnis bukan sekadar sebuah konsep idealistik, melainkan sebuah paradigma yang berfungsi sebagai pedoman moral dalam menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan material dan kebahagiaan spiritual. Aqidah yang kokoh memberikan dasar bagi praktik ekonomi yang lebih beretika, di mana nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial menjadi bagian tak terpisahkan dalam aktivitas bisnis. Dengan menjadikan ekonomi sebagai sarana untuk meraih ridha Allah, umat Muslim tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada keberkahan dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi Islam harus terus dikembangkan untuk menanggulangi

dampak negatif sistem ekonomi konvensional yang cenderung mengabaikan aspek moral dan spiritual.

Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji implementasi konkret dari integrasi aqidah dan filsafat politik Islam dalam ekonomi modern, khususnya dalam konteks kebijakan publik dan regulasi keuangan syariah. Selain itu, diperlukan studi empiris yang mendalam untuk mengevaluasi efektivitas penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam bisnis dan keuangan, baik di tingkat makro maupun mikro. Kajian terhadap inovasi dalam industri halal, sistem perbankan syariah, serta strategi digitalisasi dalam ekonomi Islam juga menjadi area yang menarik untuk dieksplorasi guna menyesuaikan konsep ekonomi Islam dengan dinamika global saat ini.

REFERENSI

- Ariton-Gelan, C. (2015). Axiological perspectives of Islamic religious and political thought. *Logos Universality Mentality Education Novelty. Section: Philosophy and Humanistic Sciences*, 03(01), 53–69. <https://doi.org/10.18662/lumenphs.2015.0301.04>
- Jughaiman, A. O. (2019). A philosophical introduction of Islamic political system and social behavior. *European Scientific Journal ESJ*, 15(26), 89–108. <https://doi.org/10.19044/esj.2019.v15n26p89>
- Karim, A. (2006). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Masyhuri, A. A. (2022). Konsep ideologi politik dalam Al-Qur'an. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8(2), 119–141. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1516>
- Mehmoona, S., & Sultana, M. (2020). Al-Milal: Journal of Religion and Thought (AMJRT), 2(2), 50–69.
- Muslich. (2004). *Etika bisnis Islami: Landasan filosofis, normatif, dan substansi implementatif*. Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII.
- Nasution, M. E., et al. (2007). *Pengenalan eksklusif ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana. P3EI UII Yogyakarta. (2012). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Qardhawi, Y. (1994). *Karakteristik Islam: Kajian analitik*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Qardhawi, Y. (2004). *Peran nilai dan moral dalam perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press.
- Sayem, A., Edwin, N., Aprianto, K., & Voak, A. (2023). Perspective on the Islamic welfare state: The goals of economic development justice. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 103–120.
- Shamsaei, M., & Mahmoudi, A. (2017). The relationship between ethics and politics in the view of Islam and Muslim scholars. *International Journal of Environmental and Science Education*, 12(5), 1391–1399.
- Siddiqi, M. N. (2002). *Kegiatan ekonomi dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tasmara, T. (2003). *Komunikasi dakwah*. Jakarta: Gaya Baru Pertama.
- Yusanto, M. I., & Widjajakusuma, M. K. (2002). *Mengagas bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Zaidillah, A. I. (2002). *Strategi dakwah dalam membentuk da'i dan khatib profesional*. Jakarta: Kalam Mulia.